

PENDIDIKAN BERBASIS MULTIKULTURALISME SUATU UPAYA PENGUATAN JATIDIRI BANGSA

Oleh:
Iriyanto Widisuseno

ABSTRACT

Multiculturalism is a tool, vehicle or the equivalent notion of ideology, function to enhance human dignity. Since multiculturalism is a tool then the sense of culture or ideology embodied in the term multiculturalism should be viewed from the perspective of function for human life. Multiculturalism has always built based on the philosophical outlook of a nation on the meaning of life and life, and relationships with environment as well as the creator. Then every nation in giving practical meaning of multiculturalism will be colored by its philosophical outlook. The multicultural education paradigm led to the creation of attitudes of learners who want to appreciate, respect for ethnic, religious and cultural society. Then, too, multicultural education to give awareness to students that differences in ethnicity, religion and culture as well as the other does not become a barrier for students to unite and cooperate. Thus, Pancasila as an ideology of education is needed, especially considering the posture of Indonesia in the form of an archipelago, and pluralistic world is at a cross position.

Keywords: *education, multiculturalism, multicultural education, ideology.*

A. PENDAHULUAN

1. Amanat Undang – Undang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 3) mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ditegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut menyiratkan bahwa melalui pendidikan hendak diwujudkan peserta didik yang memiliki berbagai kecerdasan, baik kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual maupun kecerdasan kinestetika. Pendidikan nasional memiliki misi mulia (*mission sacre*) terhadap anak didik, yaitu membangun pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan teknis, mengembangkan kepribadian yang kokoh dan membentuk karakter yang kuat.

Terbentuknya karakter peserta didik yang kuat dan kokoh diyakini merupakan hal yang penting dan mutlak dimiliki setiap peserta didik untuk menghadapi tantangan hidup di masa mendatang. Pengembangan karakter yang diperoleh melalui pendidikan, baik pada tingkat sekolah maupun perguruan tinggi dapat mendorong peserta didik menjadi anak-anak bangsa yang memiliki kepribadian unggul.

Secara kontekstual dan imperatif hakikat dan tujuan pendidikan nasional harus merepresentasikan permasalahan kondisi objektif masyarakat bangsanya, representasi dari kebutuhan masyarakat, manifestasi tipologis masyarakatnya. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan UNESCO, tujuan pendidikan adalah manifestasi hasil refleksi filosofi tentang manusia, eksistensi manusia dalam konteks sejarahnya dan tentang sistem hubungan manusia dengan alam serta masyarakat di mana dia hidup, berkreasi, dan berbuat (Charles Hammel, UNESCO, 1977). Di Indonesia ditambah dengan hubungan manusia dengan Tuhannya.

2.Pluralitas Masyarakat sebagai Kondisi Real dan Objektif.

Jika melihat kondisi masyarakat Indonesia sendiri sifatnya sangat plural. Seperti yang dicanangkan oleh para pendiri negara Indonesia dalam semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*” memmanifestasikan suatu realita wajah multikultural. Di atas masyarakat yang plural inilah NKRI berhasil dibangun dan dapat berdiri tegak, kokoh hingga sekarang ini. Istilah “kesatuan” dalam NKRI sebagai penjelmaan *Bhineka Tunggal Ika* tidak sekedar mengandung arti fisik, tetapi psikis dan kultural. Tidak juga dalam arti agregasi yang atomistik dan integrasi struktural, tetapi kesatuan yang memiliki derajat tertinggi yaitu integrasi kultural yang didalamnya mengandung solidaritas nasional (*national solidarity*) yang dilandasi nilai-nilai dasar (*core values*) kehidupan bersama. Sejak nenek moyang nilai – nilai dasar tersebut telah dijadikan prinsip kehidupan bahkan pandangan hidup. Secara objektif wajah pluraliditas masyarakat Indonesia memiliki bentuk dan strukturnya yang unik, karena itu pendidikan nasional harus memiliki wawasan pengembangan plurlarlitias masyarakat Indonesia.

3. Tantangan yang berkembang

Jika melihat fenomena yang berkembang saat ini sesungguhnya bangsa dan negara Indonesia sedang mengalami berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

a. Dari dalam negeri

1. Misalnya, pasca reformasi masih menyisakan gerakan-gerakan pemikiran pada sebagian kaum elit yang dilandasi semangat liberalisme dan kapitalisme, misalnya secara sengaja memunculkan ide – ide pemekaran wilayah untuk memperluas daerah-daerah otonomi khusus tanpa alasan rasional yang memihak kepentingan masyarakat. Padahal ide awal pengembangan otonomi daerah adalah menjadikan daerah sebagai filter bagi gerakan separatisme, mendekatkan rakyat pada pengambil keputusan (*policy maker*) dan menyebarkan serta meratakan pusat-pusat pertumbuhan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya, namun ternyata hanya membuahkan hasil sampingan (*by product*) berupa raja-raja kecil di dalam negara. Kemudian masih tersisa lagi adanya pelbagai gerakan sparatis dan teroris (RMS, OPM, GAM, radikalisme keagamaan) yang masih sering muncul saat ini. Ancaman dari luar negeri dalam bentuk usaha membantu gerakan separatis dari negara lain, kemudian klaim-klaim negara tetangga terhadap beberapa wilayah kepulauan RI.

2. Krisis budaya : krisis kepercayaan diri, krisis jatidiri yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai modus *disorientasi dan distorsi* nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Modus disorientasi disebabkan masyarakat yang semakin kehilangan orientasi nilai atau pegangan hidup. Masyarakat mengalami kegoyahan dalam pandangan hidupnya, mudah terombang– ambing dan mudah termakan provokasi yang menjerumuskan. Modus distorsi ditandai oleh semakin menurun rasa solidaritas sosial atau kesetiakawanan sebagai sesama anak bangsa. Hidup menjadi hambar, gersang, dan mudah melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarkhi (Iriyanto, 2006)

3. Merosotnya penghargaan nilai moral, kesantunan sosial dan kepatuhan terhadap hukum, nilai etik dan kesantunan sosial berlanjut konflik yang bernuansa politik, etnis dan agama seperti yang terjadi di Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku Sulawesi Tengah. Meluasnya penyakit sosial yang terjadi pada saat ini di berbagai wilayah Indonesia menandakan betapa rapuhnya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara kebangsaan, betapa kentalnya primordialisme antar kelompok dan betapa rendahnya solidaritas nasional dalam multikulturalisme. Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk.

b. Dari Luar Negeri

1. Ekses dari globalisasi yang melahirkan anak-anak liberalisme (*Neo Liberalism*) yang tumbuh menyebar hampir di seluruh bagian dunia termasuk di Indonesia, misalnya kapitalisme di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang politik. Demokratisasi dan kapitalisasi di segala bidang kehidupan kini sedang terjadi. Isu-isu HAM, lingkungan, ketenagakerjaan, pasar bebas, partisipasi politik dsb. Dunia kini semakin terbuka dari segala informasi dan komunikasi, termasuk intervensi nilai-nilai asing masuk ke Indonesia. Keseluruhan proses ini tentu membawa konsekuensi dan implikasi yang tidak selamanya menguntungkan bagi masyarakat bangsa Indonesia. Globalisasi yang dijiwai ideologi liberal terus mengembangkan sayapnya menuju suatu tatanan dunia baru (*mondial*) adalah suatu tantangan bagi negara kebangsaan termasuk Indonesia. Merebaknya pola hidup modernitas yang mengedepankan gaya hidup eksklusif, konsumtif dan materialis. Kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial semakin menajam memicu

suhu kehidupan sosial menjadi temperamental. Tidak aneh jika lewat tayangan media elektronik maupun non elektronik selalu dijumpa peristiwa-peristiwa kekerasan, kebohongan, pembunuhan, dll. Seakan nilai – nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia yang telah lama menjadi pegangan dan pandangan hidup sudah terkikis oleh perkembangan. Nilai-nilai lama tersebut sudah dianggap tidak relevan lagi, sementara sebagian masyarakat berpaling ke nilai-nilai baru yang tidak jelas orientasinya. Proses sosialitas semacam ini akan menyesatkan bangsa Indonesia sendiri. Cepat atau lambat akan kehilangan jati diri, kepercayaan diri dan karakter bangsa.

2. Ancaman dari luar negeri dalam bentuk usaha membantu gerakan separatis dari negara lain, kemudian klaim-klaim negara tetangga terhadap beberapa wilayah kepulauan RI.

Berdasarkan fakta yang berkembang tersebut pendidikan di Indonesia harus peka, dan antisipatif. Pendidikan berwawasan multikulturalisme sebagai sebuah tawaran solusi atas persoalan kemajemukan bangsa Indonesia yang sedang dan terus berkembang.

B. KONSEP MULTIKULTURALISME

Secara etimologis istilah multikulturalisme (*multiculturalism*) berasal dari kata multi (banyak)-kultur (budaya)-isme (pandangan-faham) atau faham budaya plural dan sebagai lawannya adalah monokulturalisme atau faham budaya tunggal. Secara hakiki dari istilah tersebut mengandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing. Setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggungjawab untuk hidup bersama komunitasnya. Peningkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Multikulturalisme adalah sebuah alat, wahana atau setara pengertian ideologi/faham, fungsinya untuk meningkatkan harkat martabat manusia. Karena multikulturalisme itu alat atau ideologi maka pengertian kebudayaan yang terkandung di dalam istilah multikulturalisme harus dilihat dari perspektif fungsi bagi kehidupan manusia. Yang penting di sini bagaimana kebudayaan dapat bekerja melalui pranata-pranata sosial. Sebagai sebuah ideologi multikulturalisme terserap ke dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan, mencakup kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bisnis dan politik (Parsudi Suparlan, dalam Choirul Mahfud, 2005).

Multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan dirinya sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Akhirnya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik, keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan (Musa Asy'arie, dalam Choirul Mahfud, 2005).

Persoalan muncul tatkala dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat yang kompleks memunculkan konflik, dengan sendirinya akan mengguncang tatanan multikulturalisme. Apalagi jika konflik itu melebar menjadi perebutan hegemoni kekuasaan politik, ekonomi, wilayah, harga diri yang berbasis pada suku, ras, agama, maka multikulturalisme akan dipandang sebagai kearifan yang sia-sia, yang tidak bertanggungjawab dan cermin dari lemahnya solidaritas.

Kecurigaan terhadap multikulturalisme di tengah masyarakat konflik, ketidakadilan dapat dimengerti. Dalam setiap konflik sosial, politik, apalagi yang mengarah kekerasan, akan muncul

sikap-sikap eksklusif. Pada tahap ini multikulturalisme dipandang egois dan tidak ada kepedulian.

Multikulturalisme memerlukan ruang dialog dengan berbagai kalangan lintas budaya, sosial politik, ekonomi, agama, sebagai manifestasi dari filosofi multikulturalisme sendiri yang selalu berusaha menjauh dari jebakan penyempitan wawasan paradigmatis. Melalui proses dialog multikulturalisme akan memperkuat dirinya sendiri dan secara dialektik akan membentuk pemikiran sintetik baru yang lebih sahih (Choirul Mahfud, 2005).

Multikulturalisme selalu dibangun dengan berbasis pada pandangan filsafat suatu bangsa tentang arti hidup dan kehidupan, serta hubungan sesama dengan lingkungan serta sang penciptanya. Maka setiap bangsa dalam memberikan arti praksis tentang multikulturalisme akan diwarnai oleh pandangan filosofisnya.

C. PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURALISME

Perbincangan mengenai pendidikan selalu menarik dan tidak pernah selesai. Dirasakan menarik karena pendidikan itu menyetuh kepentingan dasar seseorang, dan tak pernah selesai masalahnya dikarenakan pendidikan itu *inherent* dan *simultance* dengan proses kehidupan manusia sendiri dan berjalan sepanjang hayatnya. Tema-tema aktual dan pendekatannya pun sangat beragam, ada yang mengkaji pendidikan dengan pendekatan interdisipliner, dan ada juga dengan pendekatan multidisipliner. Ragam pendekatan interdisipliner dapat dijumpai diantaranya kajian relasi pendidikan dengan demokrasi, pendidikan dengan hak asasi, dan pendidikan dengan multikulturalisme yang melahirkan konsep pendidikan multikultural atau pendidikan berwawasan multikulturalisme.

Pendidikan berwawasan multikultural dapat diartikan suatu pendidikan yang mengapresiasi keragaman budaya sebagai realitas objektif dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam praktik pendidikan berwawasan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan, dan menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif (Choirul Machfud, 2005)

Relevansi pendidikan berwawasan multikultural teradopsi dan termodifikasi ke dalam konsep dasar pendidikan seperti tertuang dalam UU. No. 20 Tahun 2003 merumuskan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian dalam rumusan pengertian pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.

Wacana pendidikan multikultural atau pendidikan berwawasan multikulturalisme dimaksudkan untuk merespon dampak perkembangan globalisasi, dan fenomena konflik etnis, sosial budaya, yang sering muncul di kalangan masyarakat Indonesia yang berwajah multikultural. Kerawanan konflik ini sewaktu – waktu bisa timbul akibat suhu politik, agama, sosio budaya yang memanas. Penyebab konflik sangat kompleks namun sering disebabkan karena perbedaan etnis, agama, ras. Kasus perbedaan SARA yang pernah terjadi di tanah air belum lama ini misalnya konflik Ambon, Poso, dan konflik etnis Dayak dengan suku Madura di Sampit. Banyak lagi kasus semacam yang belum kita ketahui atau belum terpublikasi media masa.

Pengalaman kejadian itu menjadi catatan bagi kita semua terutama bagi kalangan pendidikan untuk mengkaji dan mencari jalan pemecahannya. Peran pendidikan disini setidaknya memberikan kesadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa pemecahan masalah melalui konflik bukan suatu cara yang baik dan tidak perlu dibudayakan. Untuk itu pendidikan formal harus mampu memberikan tawaran-tawaran pembelajaran yang mencerdaskan, misalnya mendisain materi, metode, kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat atau peserta didik akan pentingnya sikap toleran, menghormati perbedaan suku, ras, agama dan budaya. Pendidikan yang kini dibutuhkan bangsa Indonesia yang multikultural adalah pendidikan yang memberikan peran sebagai media transformasi budaya (*transformation of culture*) dan transformasi pengetahuan (*transformation of knowledge*). Selama ini pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada perannya sebagai media transformasi pengetahuan.

Paradigma baru yang harus dikembangkan di dunia pendidikan saat ini adalah paradigma pendidikan yang mampu menempatkan pendidikan sebagai media transformasi budaya disamping sebagai media transformasi pengetahuan (Hamdan Mansur, 2004). Alternatif yang ditawarkan adalah pendidikan berwawasan multikulturalisme (pendidikan multikultural). Paradigma pendidikan multikultural tersebut bermuara pada terciptanya sikap peserta didik yang mau menghargai, menghormati perbedaan etnis, agama dan budaya dalam masyarakat. Kemudian juga, pendidikan multikultural memberi kesadaran pada peserta didik bahwa perbedaan suku, agama dan budaya serta lainnya tidak menjadi penghalang bagi peserta didik untuk bersatu dan bekerjasama. Dengan perbedaan yang bermuatan solidaritas nasional (*national solidarity*) justru menjadi pendorong untuk berlomba dalam kebaikan bagi kehidupan bersama. Pengalaman lalu pada masa sentralisme kekuasaan pemerintah Orde Baru tidak perlu terulang kembali, dengan pemaksaan *monokulturalisme* yang nyaris seragam telah memunculkan reaksi balik masyarakat. Langkah kebijakan ini bukan tanpa membawa implikasi negatif terhadap upaya rekonstruksi kebudayaan nasional yang multikultural.

Di Indonesia pendidikan berwawasan multikulturalisme tergolong masih baru, namun jika dipandang sebagai sebuah pendekatan maka pendidikan berwawasan multikultural sangat sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogin, terlebih pada masa pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yang sudah dimulai sejak tahun 1999/2000, dan hingga saat ini pelaksanaannya belum mencapai harapan semua pihak. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara langsung atau pun tidak, memberi dampak bagi dunia pendidikan untuk menciptakan otonomi pendidikan. Dengan demikian pendidikan multikultural yang ditawarkan ini sejalan dengan pengembangan demokrasi yang berjalan seiring dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Perlu difahami, jika kebijakan otonomi daerah tidak dilaksanakan dengan hati – hati, kebijakan ini justru akan menggiring kita ke arah jurang perpecahan bangsa atau disintegrasi bangsa,

\ Monokulturalisme di dunia pendidikan kita masih nampak sekali jika ditilik dari beberapa segi pendidikan. Misalnya, mulai dari kurikulum, materi pelajaran, hingga metode pembelajaran di kelas sama. Lengkap dengan penyelenggaraan pendidikan yang etatisme dan diperkuat dengan sistem birokrasi yang ketat. Semua peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dibuat pusat berlaku untuk semua daerah.

D. PEMBERLAKUAN POLA PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Di Indonesia wacana pendidikan multikultural masih dipandang relatif baru dikenal sebagai metode pendekatan permasalahan bagi masyarakat yang heterogin. Pada masa otonomi dan desentralisasi yang telah diberlakukan sejak 1999 hingga sekarang, pemberlakuan pendidikan multikultural sejalan dengan misi pengembangan demokrasi yang dikonsepsikan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Namun jika otonomisasi kekuasaan daerah tidak dilaksanakan dengan baik justru dapat menjerumuskan kita ke arah perpecahan.

Berakhirnya sentralisme kekuasaan pada masa Orde Baru yang memaksakan “monokulturalisme” mengandung implikasi negatif bagi upaya rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Bersamaan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi gejala peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas” Kecenderungan ini jika tidak terkendali akan menimbulkan disintegrasi sosio-kultural bahkan disintegrasi politik. Multikulturalisme mengandung pengertian dan nilai universal yang menyangkut kepentingan semua orang, bangsa, namun multikulturalisme adalah hanya sebuah alat, wahana, karena itu penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi real masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila.

Memberlakukan pendidikan berwawasan multikulturalisme membawa konsekuensi perubahan paradigma manajemen dan kurikulum pendidikan. Masalah manajemen pendidikan di sini adalah bagaimana mengubah orientasi; (a) dari penyelenggaraan pendidikan dengan dominasi kekuasaan birokrasi menjadi dominasi kekuasaan akademi; (b) dari pendekatan seragam ke pendekatan beragam (multikultural), demokrasi terbuka; (c) dari serba pusat ke distribusi daerah; (d) dari kecenderungan berorientasi global beralih ke orientasi kepentingan nasional dan regional. Sedangkan masalah kurikulum adalah bagaimana menyusun institusional curriculum di semua jenjang pendidikan dapat mengadopsi nilai-nilai pluralitas kedaerahan, dengan prinsip menjunjung tinggi khasanah budaya nasional dan kearifan lokal.

Pelaksanaan pendidikan berwawasan multikulturalisme di Indonesia dapat menggunakan model yang disarankan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga jenis transformasi: (1). transformasi diri, (2).transformasi sekolah dan proses belajar dan pembelajaran, (3) transformasi masyarakat (Choirul Mahfud, 2005).

Pendidikan multikultural yang mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya (the pride in one home nation), akan mengidentifikasi perkembangan sikap seseorang dalam kaitan dengan kebudayaan-kebudayaan lain dalam masyarakat lokal sampai dengan masyarakat global. James Banks mengemukakan beberapa tipologi sikap seseorang terhadap identitas etnik atau cultural identity, yaitu :

1. Ethnic psychological capacity : pada tingkat ini seseorang masih terperangkap dalam stereotipe kelompoknya sendiri, dan menunjukkan rasa harga diri yang rendah. Sikap tersebut menunjukkan sikap kefanatikan terhadap nilai-nilai budaya sendiri dan menganggap budaya lain inferior.
2. Ethnic encapsulation : pribadi demikian juga terperangkap dalam kapsul kebudayaan sendiri terpisah dari budaya lain. Sikap ini biasanya mempunyai perkiraan bahwa hanya nilai-nilai budayanya sendiri yang paling baik dan paling tinggi, biasanya memiliki sikap curiga terhadap budaya atau bangsa lain.
3. Ethnic identities clarification : pribadi semacam ini mengembangkan sikapnya yang positif terhadap budayanya sendiri dan menunjukkan sikap menerima dan memberikan jawaban positif kepada kepada budaya – budaya lainnya.
4. The ethnicity : pribadi ini menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap budaya yang datang dari etnis lain, seperti budayanya sendiri.

5. Multicultural ethnicity : pribadi ini menunjukkan sikap yang mendalam dalam menghayati kebudayaan lain di lingkungan masyarakat bangsanya.
6. Globalism : pribadi ini dapat menerima di berbagai jenis budaya dan bangsa lain. Mereka dapat beraul secara internasional dan mengembangkan keseimbangan keterikatannya terhadap budaya budaya bangsa dan global.

Pendidikan berwawasan multikulturalisme di Indonesia dinilai penting utamanya dalam memupuk rasa kebersamaan dalam keberagaman untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semangat kemerdekaan tahun 1945. Memupuk nilai-nilai partisipatif, demokrasi dan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Pengembangan Pendidikan Multikultural jika dilakukan secara tepat yaitu sesuai dengan azas filosofi bangsa Indonesia, searah dengan semangat Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*) untuk mewujudkan persatuan yang diinginkan rakyat kebanyakan, dan mediasinya adalah "toleransi"

Untuk itu Pancasila sangat dibutuhkan sebagai ideologi pendidikan, apalagi dengan mempertimbangkan postur Indonesia berupa negara kepulauan, pluralistik dan berada pada posisi silang dunia. Ideologi Pancasila di sini menempati posisi sebagai *Value Devence* dalam kerangka *Main Security Policy* untuk menghadapi bahaya dari luar berupa kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik. Bahkan dalam menentukan kebijakan keamanan regional, dan bahaya dari dalam berupa konsolidasi demokrasi, keadilan sosial yang harus dicapai, kejahatan, kekerasan dan ketidakstabilan politik.

The Founding Fathers telah menjadikan Pancasila tidak sekuler, karena pada saat dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang penuh nuansa penjajahan, justru bukan menempatkan HAM (Kemanusiaan yang adil dan beradab) sebagai sila pertama, tetapi sila Ketuhanan YME sebagai refleksi sifat religius bangsa Indonesia yang tidak hanya menghormati religi sebagai kepentingan hukum, tetapi juga rasa keagamaan serta ketenteraman hidup beragama.

Ideologi Pancasila ditempatkan sebagai *Margin of Appreciation* atau juga bisa dijadikan sebagai pembenaran terhadap pemikiran Constructive Pluralism yang di satu pihak tidak dapat menyetujui gerakan atas dasar *Right to Self Determination*, tetapi juga menentang praktik *minority by force* dan *minority by will* (Muladi, 2006).

Margin of Appreciation sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan pembenaran berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal. Pembenaran dan pengakuan tidak hanya berasal dari satu sisi saja (nasional) tetapi juga dari sisi internasional. Prosesnya bila perlu melalui proses yuridis baik nasional maupun internasional.

E. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

Agar supaya dalam pemberlakuan Pendidikan Multikultural tidak kehilangan dasar dan arah pengembangan ilmu dan teknologi, maka Pancasila perlu dijadikan sebagai paradigma filosofis keilmuan. Pancasila telah memenuhi syarat sebagai paradigma filosofis keilmuan.

1. Nilai-nilai Pancasila sudah mengakar di dalam sejarah pembentukan kehidupan kebangsaan Indonesia, terutama sebagai pandangan hidup dan cara hidup.
2. Secara formal telah teruji keberadaannya, terutama sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.
3. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pancasila memenuhi syarat sbgmn dianjurkan Thomas Kuhn, yaitu mampu berfungsi sebagai: sumber nilai, hukum, dan metodologi.

Peran Pancasila sebagai Paradigma filosofis keilmuan harus sampai pada kesadaran, bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan hanyalah akan menjebak dirinya pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidahnya sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yg bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yg berbudaya.

1. Sila Ketuhanan YME: melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yg rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dlm alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya.
2. Sila Kemanusiaan yg adil dan beradab: memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tdk hanya utk kelompok, lapisan tertentu.
3. Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan universalisme dlm sila-sila yg lain, shg supra sistem tdk mengabaikan sistem dan sub sistem. Solidaritas dlm subsistem sangat penting utk kelangsungan keseluruhan individualitas, ttp tdk mengganggu integrasi.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu penget harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan masal.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tdk boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi

F. PENUTUP

Sebagai kata penutup dari uraian makalah singkat ini dapat dikemukakan bahwa pendidikan berwawasan multikulturalisme menempatkan pendidikan pada posisi peran ganda, yaitu :

- a. Membangun masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter.
- b. Mengemban misi sebagai sarana alter-natif pemecahan konflik
- c. Memperkaya nilai-nilai kearifan lokal, sehingga secara langsung memperkuat khasanah budaya nasional.
- d. Memperkuat akar budaya dalam pengembangan kepribadian dan ilmu pengetahuannya.
- e. Mengapresiasi nilai kultural dalam pengembangan kurikulum baik nasional dan lokal
- f. Membentuk pribadi masyarakat Indo-nesia yang cinta damai dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keberagaman.
- g. Meletakkan dan membangun nilai-nilai dasar yang secara imperatif sebagai landasan dan arah pengembangan ilmu.
- h. Membangun sistem pemahaman (epis-temologi), Pancasila harus terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yg menjadi tuntutan peradaban manusia dewasa ini.
- i. Menuntut peran Ideologi Pancasila se-bagai penguatan sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Charles Hammel, UNESCO, 1977

Choirul Machfud, 2005, Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamdan Mansur, 2004, Pembinaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

Iriyanto Widisuseno, 2006, Pengembangan MPK dalam Perspektif Filosofis, Makalah SIMNAS MPK IV, UNS Surakarta.

Muladi, 2006, Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.